

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN LITERASI
SEKOLAH (GLS) PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN
MALANG**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Kebijakan Pengembangan Pendidikan**



Disusun Oleh :

**APRIDHONA TITO MINAYUGIE
NIM 201710240211008**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

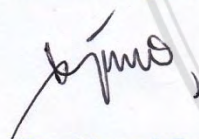
Juli 2019

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN LITERASI
SEKOLAH (GLS) PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN
MALANG**

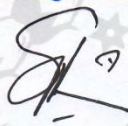
APRIDHONA TITO MINAYUGIE
NIM : 201710240211008

Telah disetujui
Pada hari/tanggal, Selasa 16 Juli 2019

Pembimbing Utama


Dr. Ahmad Juanda

Pembimbing Pendamping

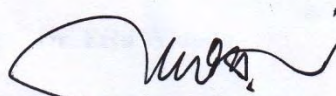

Dr. Mohamad Syahri

Direktur
Program Pascasarjana



Achsanul In'am, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Kebijakan dan
Pengembangan Pendidikan


Dr. Agus Tinus

TESIS

APRIDHONA TITO MINAYUGIE
NIM : 201710240211008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, **Sabtu 13 Juli 2019**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/ Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua/ Penguji : Dr. Ahmad Juanda

Sekretaris/ Penguji : Dr. Mohamad Syahri

Penguji : Dr. Estu Widodo

Penguji : Dr. Siti Fatimah Soenaryo

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **APRIDHONA TITO MINAYUGIE**

NIM : **201710240211008**

Program Studi : **Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **TESIS dengan judul : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH (GLS) PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MALANG** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Malang,
Yang menyatakan,



APRIDHONA TITO M.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Malang”. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabatnya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Akhsanul In'am, Ph.D, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Dr. Agus Tinus, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan.
3. Dr. Ahmad Juanda, AK., MM, selaku Pembimbing Utama.
4. Dr. Mohamad Syahri, M.Si, selaku Pembimbing Pendamping.
5. Bapak dan Ibu Dewan Pengajar (Dosen) dan karyawan di lingkungan program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak/Ibu Kepala SDN 2 dan 3 Pandansari, dan Dewan Guru yang telah membantu dan memfasilitasi peneliti dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah banyak membantu baik moril maupun materil.

Semoga Allah SWT, menerima semua amal baik dari Bapak/Ibu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, dan semoga bisa memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Malang, 1 Juli 2019

Penulis

ABSTRAK

Minayugie, Apridhona Tito. 2019. *Analisis Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Malang*. Tesis – Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I) Dr. Ahmad Juanda (II) Dr. Mohamad Syahri

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dan untuk mendeskripsikan faktor pendukung serta penghambat dalam upaya implementasinya. Untuk mengetahui pelaksanaannya, peneliti melakukan penelitian tentang Analisis Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) jenjang Sekolah Dasar di SDN 2 dan 3 Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara serta dokumen. Analisis data hasil penelitian dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi data). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan gerakan literasi sekolah (GLS) telah memenuhi 2 dari 4 aspek, yaitu aspek komunikasi dan sumberdaya. Sedangkan aspek yang menjadi kendala adalah aspek disposisi dan struktur birokrasi. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah (GLS) yang utama adalah belum tersedianya tenaga pustakawan serta keterlibatan orang tua dalam pelaksanaan kegiatan yang masih kurang, serta belum dibentuknya Tim Literasi Sekolah (TLS). Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah (GLS) diantaranya melibatkan siswa dalam penambahan literatur, penunjukan guru sebagai tenaga perpustakaan.

Kata Kunci : Analisis Implementasi, Kebijakan, Gerakan Literasi Sekolah

ABSTRACT

Minayugie, Apridhona Tito. 2019. *Analysis of the Implementation of the School Literacy Movement (GLS) Policy for Primary Schools in Malang Regency*. Thesis - Master of Policy and Education Development Study Program, Directorate of Postgraduate Program at the University of Muhammadiyah Malang. Advisors : (I) Dr. Ahmad Juanda (II) Dr. Mohamad Syahri

The purpose of the research is to analyze the implementation of the School Literacy Movement (GLS) policy and to describe the supporting and inhibiting factors in its implementation efforts. To find out the implementation, the researcher conducted a study on the Analysis of the Implementation of the School Literacy Movement (GLS) at the elementary school level in SDN 2 and 3 Pandansari, Ngantang District, Malang Regency. This research uses descriptive qualitative approach. The data collection techniques used are observation, interviews and documents. Analysis of the results of research data is done by data reduction, data presentation, and conclusion (data verification). The results of the study show that in general the implementation of the school literacy movement (GLS) fulfills 2 of the 4 aspects, namely the communication and resource aspects. While the obstacle aspects are aspects of disposition and bureaucratic structure. The main obstacle experienced in the implementation of the school literacy movement (GLS) is the unavailability of librarians and the involvement of parents in carrying out activities that are still lacking, and the establishment of the School Literacy Team (TLS). Efforts to overcome the obstacles in the implementation of the school literacy movement (GLS) include involving students in the addition of literature, the appointment of teachers as library staff.

Keywords: Implementation Analysis, Policy, School Literacy Movement

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
A. PENDAHULUAN	1
B. KAJIAN PUSTAKA	4
1. Implementasi Kebijakan	4
2. Literasi	4
3. Gerakan Literasi Sekolah (GLS).	5
4. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III	10
C. METODE PENELITIAN	12
D. HASIL PENELITIAN	14
1. Implementasi Kebijakan	14
Sumber Data : Diolah oleh Peneliti.....	17
2. Faktor Pendukung dan Pengambat Implementasi GLS	17
Sumber Data : Diolah oleh Peneliti.....	20
E. PEMBAHASAN.....	20
1. Implementasi Gerakan Literasi Sekolah	20
2. Hambatan Pelaksanaan GLS di SDN 2 dan 3 Pandansari.....	22
Sumber Data : Diolah oleh Peneliti.....	23
F. PENUTUP.....	26
1. Simpulan	26
2. Saran	26
RUJUKAN	28
DAFTAR LAMPIRAN	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Aspek-aspek Implementasi Kebijakan.....	16
Tabel 2 Faktor Pendukung dan Faktor Pengambat Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Malang.	19
Tabel 3 Hambatan Implementasi GLS Di SDN 2 & 3 Pandansari Mengacu Model Implementasi Kebijakan yang Dikembangkan oleh George C. Edward III	23



DAFTAR LAMPIRAN
DOKUMEN CATATAN LAPANGAN

Lampiran 1	: Dokumen Wawancara	32
Lampiran 2	: Dokumen Observasi	42
Lampiran 3	: Penyajian Data	46
Lampiran 4	: Foto SDN 2 dan 3 Pandansari	49



A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Hal tersebut yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara. Bapak Pendidikan Nasional Indonesia ini juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Pendidikan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Di Indonesia Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dalam Pasal 31, ayat 3 menyebutkan bahwa penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional guna meningkatkan keimanan, ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Pemerintah.

Dalam mewujudkan tujuan pendidikan tersebut diperlukan alat yang kita kenal dengan istilah kurikulum. Kurikulum merupakan hal yang sangat penting dalam sistem pendidikan, karena selain membantu untuk mencapai tujuan dari pendidikan, kurikulum juga berisi tentang pengalaman belajar yang didapatkan oleh para pelajar. Penerapan kurikulum yang tepat

menentukan seberapa berkualitas proses pembelajaran pada lembaga pendidikan di Indonesia. Pada dasarnya kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan dari berbagai program pendidikan. Sejarah kurikulum di Indonesia berganti istilah sebanyak 11 kali, dilansir dari Litbang “Kompas”/NDW, diolah dari data Kemdikbud serta berbagai sumber. Diawali pada masa awal kemerdekaan (1945-1950) yang disebut Kurikulum 1947 yaitu Rencana Pelajaran dirinci dalam Rencana Pelajaran Terurai hingga mulai tahun 2013 disebut dengan Kurikulum 2013 atau disingkat K-13. Kurikulum 2013 memiliki empat aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam Kurikulum 2013 ditekankan pendidikan karakter yang dikuatkan oleh Peraturan Mendikbud Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Di dalam Permendikbud tersebut berisi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) salah satunya adalah gemar membaca.

Menghadapi era revolusi industri 4.0 peserta didik dituntut untuk mengasah keterampilan membaca yang berujung kemampuan memahami informasi secara analitis, kritis, dan reflektif. Untuk mendukungnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Dalam upaya penumbuhan minat baca Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, menggalas dan mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Gerakan ini juga sebagai upaya mewujudkan salah satu dari 9 agenda prioritas (Nawacita), yaitu poin ke delapan tentang revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum dan dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, pemerintah memandang perlu adanya penguatan pendidikan karakter.

GLS juga sebagai bentuk respon dari data evaluasi PISA pada tahun 2012 yang menunjukkan bahwa rendahnya kompetensi peserta didik Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan membaca. PISA (*Programme for International Student Assessment*) adalah studi internasional menguji prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa sekolah (Setiawan, Diah Sri Lestari, Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jember, Matematika, & Berpikir Tingkat Tinggi, 2014). Tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah aliterasi, yaitu bisa namun tidak mau membaca. Meskipun buku tersedia namun minat baca masyarakat Indonesia rendah. Seperti data dari BPS, 1 : 1000 jadi dari 1000 orang hanya 1 yang memiliki minat baca, sisanya kurang memiliki keinginan untuk membaca. (Nur 'aini, 2017).

Hasil penelitian (Saputri, Fauzi, & Nurhaidah, 2017) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Anak Kelas 1 SD Negeri 20 Banda Aceh diantaranya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi literasi anak yaitu latar belakang pendidikan orang tua siswa, tingkat kepedulian dan pendampingan keluarga, bimbingan belajar yang didapatkan, usia anak, dan faktor genetik (keturunan). (Abidin & Abidin, 2017) Dalam penelitiannya menegaskan bahwa rendahnya kemampuan literasi juga dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menentukan model pembelajaran yang tepat untuk kemampuan literasi menulis. (Yuliyati, 2014) dalam penelitiannya juga menyebutkan semua unsur sekolah harus berusaha keras untuk terlibat dalam membangun budaya literasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diambil judul “Analisis Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Malang”. Studi kasus di SDN 2 dan 3 Pandansari. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana implementasi kebijakan Gerakan Literasi Sekolah? 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Gerakan Literasi Sekolah?

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya Implementasi Kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. (Agustino, 2016:126). Van Meter dan Van Hord (1975:65) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Barret (2004:251) yang menyatakan implementasi kebijakan sebagai *“translating policy into action”*, yang artinya menterjemahkan kebijakan ke dalam tindakan. Jadi implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan ke dalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri. Dari penjelasan beberapa ahli diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan tiga hal, yakni: (i) adanya tujuan atau sasaran, (ii) adanya aktivitas, (iii) adanya hasil. Implementasi Kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam tahapan keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak. Udoji mempertegas (1981:23) implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.

2. Literasi

Istilah literasi dalam bahasa latin disebut sebagai *Literatus* yang artinya adalah orang yang belajar. Literasi menurut Laporan Penelitian oleh Cambridge Assessment pada Januari 2013 adalah sebuah tindakan. Literasi bukanlah kemampuan umum yang dimiliki seseorang (atau tidak

memiliki). Literasi adalah serangkaian tindakan dan transisi yang digunakan orang membaca dan menulis untuk keperluan pribadi dan sosial. Sedangkan Pengertian Literasi dalam konteks Gerakan Literasi Sekolah yang termuat dalam Buku Saku GLS adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/atau berbicara. Tingkatan literasi ada dua yakni literasi dini dan literasi dasar. Literasi dini merupakan kemampuan seseorang untuk menyimak memahami bahasa lisan, berkomunikasi melalui gambar dan tutur yang dibentuk oleh lingkungan social di rumah. Dan literasi dasar merupakan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menghitung yang berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan mempersiapkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.

3. Gerakan Literasi Sekolah (GLS).

Dalam upaya menumbuhkan budi pekerti siswa, pemerintah melalui kemdikbud meluncurkan sebuah gerakan yang disebut Gerakan Literasi Sekolah. Gerakan ini bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat. (Antasari, 2015) Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan yang bertujuan mewujudkan ekosistem sekolah sebagai organisasi pendidikan dengan warga yang literat sepanjang hayat dengan melibatkan publik. GLS memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Kegiatan wajib yang dilakukan adalah dengan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dan bertujuan untuk menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat. Materi bacaan dapat bermuatan budi pekerti, berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik. Dalam GLS terdapat komponen penting penunjang implementasi yaitu pelibatan orang tua peserta didik dan masyarakat.

a. Konsep dan Prinsip GLS

(Development, 2008) dan (Ferguson, 2005) menguraikan komponen literasi informasi adalah Literasi Dasar, Literasi perpustakaan, Literasi Media, Literasi teknologi, dan Literasi Visual. Literasi sendiri lebih dari sekedar membaca dan menulis, tapi mencakup kemampuan menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, auditori, dan digital. Adapun Secara umum, literasi memiliki lima komponen penting yang saling berkaitan sebagai berikut: 1) Literasi Dasar, dalam literasi dasar ada 5 kemampuan yang harus dikuasai yaitu kemampuan mendengarkan, membaca, menulis, berbicara, dan menghitung. Yang berkaitan dengan kemampuan untuk menganalisis, menerima, mengkomunikasikan berdasarkan pemahaman yang diserap sendiri.

Adapun yang ke- 2) Literasi Perpustakaan, yaitu kemampuan lanjutan yang dapat memaksimalkan literasi perpustakaan yang sudah ada. Diantaranya membedakan antara buku fiksi dan non fiksi, memahami sistem pengelompokan buku, dan memahami penggunaan katalog, pengindeksan, serta memaksimalkan pemanfaatan berbagai referensi. Hingga akhirnya akan memiliki pemahaman/pengetahuan untuk menggunakan perpustakaan sebagai salah satu akses mendapatkan informasi untuk mengerjakan tugas. 3) Literasi Media, yaitu kemampuan untuk memahami berbagai bentuk media yang beragam, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan menguasai tujuan penggunaannya, yang dalam penggunaannya tidak hanya sebagai hiburan tetapi dapat memenuhi informasi dan memperkaya pengetahuan.

Dan yang ke- 4) Literasi Teknologi, yaitu kemampuan untuk memahami kelengkapan teknologi, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan etika dalam menggunakan teknologi tersebut. Termasuk bagaimana cara menghidupkan computer, mematikan computer, menyimpan dan mengolah data, serta menggunakannya sesuai kebutuhan. 5) Literasi Visual, adalah pemahaman tingkat lanjut antara

literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan memanfaatkan materi visual dan audio-visual secara kritis, selektif, dan bermartabat.

Beragam materi visual kita terima setiap harinya, baik dalam bentuk tercetak maupun televisi atau internet, yang didalamnya perlu kita saring dan sesuaikan dengan etika dan kepatutan. Dan dalam GLS jenjang sekolah dasar menekankan pada Literasi Dasar yaitu kemampuan mendengarkan, membaca, menulis, berbicara, dan menghitung. Yang berkaitan dengan kemampuan untuk menganalisis, menerima, mengkomunikasikan berdasarkan pemahaman yang diserap sendiri.

b. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah

Praktik-praktik yang baik dalam gerakan literasi sekolah menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1) perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang bisa diprediksi, 2) program literasi yang baik bersifat berimbang, 3) program literasi berlangsung di semua area kurikulum, 4) tidak ada istilah terlalu banyak untuk membaca dan menulis yang bermakna, 5) diskusi dan strategi bahasa lisan sangat penting.

c. Tujuan Gerakan Literasi Sekolah

Gerakan Literasi Sekolah memiliki tujuan umum dan tujuan khusus, diantaranya adalah menumbuh kembangkan warga sekolah dan ekosistem pendidikan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan tujuan khusus nya adalah memupuk budi pekerti, menciptakan ekosistem literasi sekolah, menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajar (Senge, 1990), melaksanakan kegiatan pengelolaan pengetahuan, memelihara keberlanjutan budaya literasi.

d. Sasaran Gerakan Literasi Sekolah

Insan dan ekosistem pendidikan dalam satuan pendidikan, meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua peserta didik, komite sekolah, dan warga yang peduli terhadap literasi.

e. Strategi Membangun Budaya Literasi Sekolah

Sekolah memiliki peranan yang amat penting dalam menanamkan budaya literat pada peserta didik. Agar sekolah mampu menjadi garis depan dalam pengembangan budaya literat, Beers,dkk. (2009) dalam buku *A Prinsipal's Guide to Leteracy Instruction* menyampaikan beberapa strategi untuk menciptakan budaya literasi yang positif di sekolah, diantaranya : 1) mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, 2) mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat, 3) mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat.

f. Indikator Sekolah Yang Sudah Membangun Budaya Literasi

Berikut ini adalah alat ukur budaya literasi sekolah yang baik menurut (cf. Beers dkk., 2009). Yang pertama dari Lingkungan Fisik, meliputi 1) Terpampangnya karya peserta didik di lingkungan sekolah, termasuk koridor dan kantor (kepala sekolah, guru, administrasi). 2) Karya peserta secara berkala diubah untuk memberi kesempatan yang seimbang kepada semua peserta didik. 3) Tersedia pojok-pojok baca di semua ruang kelas dengan berbagai macam buku non materi. 4) Buku dan materi bacaan lain tersedia juga untuk peserta didik dan orang tua/pengunjung di kantor dan ruangan selain ruang kelas. 5) Kantor kepala sekolah memajang karya peserta didik dan buku bacaan untuk anak. 6) Kantor kepala sekolah mudah diakses oleh seluruh warga sekolah.

Berikutnya di lingkungan Sosial dan afektif adanya penghargaan terhadap prestasi peserta didik diberikan secara rutin (tiap minggu/bulan). Upacara hari Senin merupakan salah satu kesempatan yang tepat untuk pemberian penghargaan mingguan. Kepala sekolah mengenali peserta didik bila masuk ruang kelas (bukan hanya peserta didik yang berprestasi atau dianggap bermasalah). Kepala sekolah terlibat aktif dalam pengembangan literasi. Merayakan hari-hari besar dan nasional dengan nuansa literasi, misalnya merayakan Hari Kartini dengan membaca puisi dan surat-suratnya. Terdapat budaya kolaborasi

antar guru dan staf, dengan mengakui kepakaran masing-masing (dan tidak saling menjatuhkan). Terdapat waktu yang memadai bagi staf untuk berkolaborasi menjalankan program literasi dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaannya. Staf sekolah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam menjalankan program literasi.

Yang ketiga di Lingkungan Akademik terdapat Tim Literasi Sekolah yang bertugas melakukan asesmen dan perencanaan. Bila diperlukan, ada pendampingan dari pihak eksternal. Disediakan waktu khusus dan cukup banyak untuk pembelajaran dan pembiasaan literasi: membaca dalam hati, membacakan buku dengan nyaring, membaca bersama, membaca terpandu, diskusi buku, bedah buku, presentasi. Waktu berkegiatan literasi dijaga agar tidak dikorbankan untuk kepentingan lain yang dianggap tidak perlu. Disepakati waktu berkala untuk Tim Literasi Sekolah membahas pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Disepakati waktu berkala untuk Tim Literasi Sekolah membahas pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Ada kesempatan pengembangan profesional tentang literasi yang diberikan untuk staf, melalui kerja sama dengan institusi terkait (perguruan tinggi, dinas pendidikan, dinas perpustakaan, atau berbagi pengalaman dengan sekolah lain). Seluruh warga sekolah antusias menjalankan program literasi, dengan tujuan membangun organisasi sekolah yang suka belajar.

Aspek-aspek tersebut diatas adalah karakteristik penting dalam pengembangan budaya literasi di sekolah. dalam pelaksanaannya, sekolah dapat mengadaptasinya sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Guru dan pimpinan sekolah perlu bekerjasama untuk mengimplementasikan strategi tersebut.

g. Tiga Tahap Pelaksanaan GLS

Program GLS dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah di seluruh Indonesia. Kesiapan ini mencakup kesiapan kapasitas sekolah (ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, sarana, prasarana literasi), kesiapan warga sekolah, dan kesiapan system pendukung lainnya (partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan

perangkat kebijakan yang relevan). Untuk memastikan keberlangsungannya dalam jangka panjang, GLS dilaksanakan dengan tahap (1) pembiasaan, (2) pengembangan, dan (3) pembelajaran.

4. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III bersifat top-down. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Direct and Indirect Impact on Implementation. Terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; (iv) struktur birokrasi.

Variabel pertama adalah komunikasi, menurut Edward III komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat 3 indikator untuk mengukur keberhasilan variable komunikasi, yaitu a) Transmisi, penyaluran yang baik akan dapat menghasilkan implementasi yang baik pula, sering kali terjadi salah pengertian (miskomunikasi) hal ini karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan; b) Kejelasan, komunikasi haruslah jelas dan tidak ambigu; dan c) Konsistensi, agar tidak membingungkan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: a) Staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. b) Informasi, implementor harus mengetahui cara melaksanakan kebijakan dan mengenai regulasi pemerintah yang telah

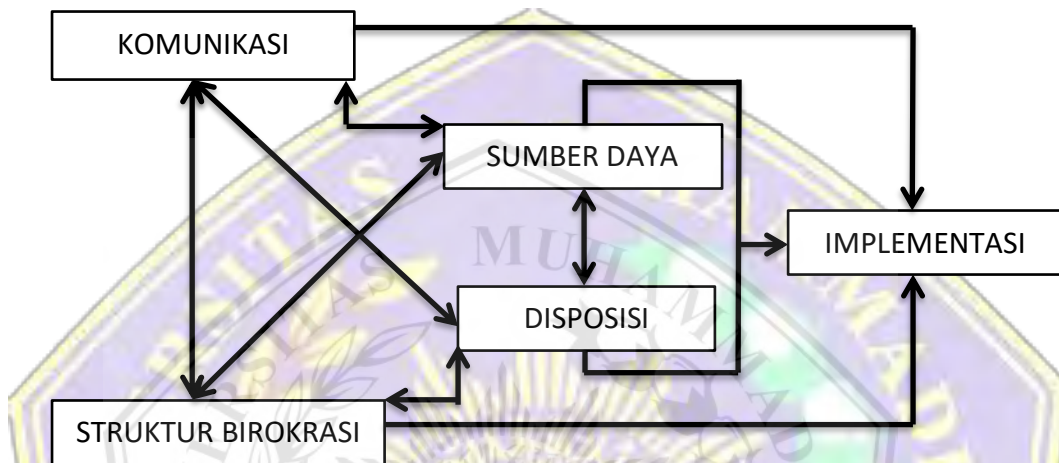
ditetapkan. c) Wewenang, kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. d) Fasilitas, implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga adalah disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan, merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut Edward III, adalah: a) Efek disposisi, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. b) Melakukan pengaturan birokrasi, hal ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. c) Insentif, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan untuk menambah biaya tertentu mungkin akan membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest / organisasi).

Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik adalah: a) Membuat Standar Operating Procedures (SOP), adalah suatu prosedur atau aktifitas terencana rutin bagi

para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar minimum yang telah ditetapkan. b) Melaksanakan fregmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktifitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai pada bidangnya masing-masing.

Gambar 1 Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation



Sumber: Edward III (1980:21)

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiono,2009:306). Adapun lokasi penelitian adalah di SDN 2 dan 3 Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Dimana kedua sekolah ini adalah sekolah yang mengalami kerusakan paling parah dari 38 sekolah yang ada di kecamatan Ngantang, saat terjadi Erupsi Gunung Kelud tahun 2014. Dimana peneliti beranggapan bahwa kerusakan berimbas pada minimnya sarana prasarana, yang pasti juga akan berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan Gerakan Literasi Sekolah.

Peneliti bertindak sebagai instrument utama baik dalam pengumpulan data maupun analisis data. Data diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu Kepala Sekolah dan Guru. Sedangkan sumber data sekunder dari orang lain dan dokumen yang ada yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperanserta dan wawancara mendalam. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data-datanya. Pedoman wawancara hanya menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara ini, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Peneliti perlu membuat rangkuman yang lebih sistematis terhadap hasil wawancara. Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Dari berbagai sumber data, perlu dicatat mana data yang dianggap penting, tidak penting, dan data yang sama dikelompokkan. Hubungan satu data dengan data yang lain perlu dikonstruksikan sehingga menghasilkan pola dan makna tertentu. Data yang masih diragukan perlu ditanyakan kembali kepada sumber data lama atau yang baru agar memperoleh ketuntasan dan kepastian. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman (Creswell, 2008). Dalam buku (Creswell, 2008) Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai mendapatkan hasil yang tuntas dan lengkap. Ada beberapa tahapan dalam analisis data kualitatif, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pengecekan Keabsahan Data Menggunakan teknik Triangulasi, yaitu teknik yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap semua data. Merupakan proses

penyokongan bukti terhadap temuan, analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan peneliti yang berasal dari: 1. Individu (informan) yang berbeda (kepala sekolah dan guru) 2. tipe/ sumber data (wawancara pengamatan dan dokumen), serta 3. Metode pengumpulan data (wawancara pengamatan). Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi oleh Denzin (Bachri, 2010). Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen (Raco, 2010). Dan peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan pada penelitian kualitatif, diharapkan dapat menjadi temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

D. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini dideskripsikan mengacu pada rumusan masalah pada pendahuluan yang diuraikan dibawah ini.

1. Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Malang

Implementasi Gerakan Literasi Sekolah di Kecamatan Ngantang dilaksanakan setelah penerapan Kurikulum 2013 yang dimulai pada tahun 2014. Penerapan Kurikulum 2013 dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari kelas 1 dan kelas 4 pada tahun pertama penerapan, dan bertambah kelas 2 dan 5 pada tahun berikutnya, hingga pada tahun pelajaran 2018-2019 himbauan Pemerintah untuk secara serentak keseluruhan jenjang melaksanakan Kurikulum 2013. SDN 3 Pandansari baru melaksanakan Kurikulum 2013 pada tahun Pelajaran 2018-2019, namun himbauan untuk melaksanakan Gerakan Literasi Sekolah sudah dimulai sejak tahun 2015. Sedangkan SDN 2 Pandansari sudah melaksanakan mulai tahap awal

implementasi Kurikulum 2013. Didukung dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Sudah, semenjak melaksanakan Kurikulum 2013 dan himbauan dari dinas untuk melaksanakan, sekolah kami sudah melaksanakan kebijakan tersebut. Ya, siap tidak siap ya harus dilaksanakan, karena juga memiliki tujuan yang baik untuk siswa. (WW/KS2/SD2/1-19)

Iya, dan di sekolah kami sudah melaksanakan kebijakan tersebut semenjak dihimbau oleh dinas untuk melaksanakan baik yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 maupun yang belum. Tanggapan saya, bagus untuk diterapkan namun ya bisa dilihat sendiri kondisi di desa mungkin tidak sama dengan di kota dalam melaksanakannya. (WW/KS1/SD3/1-19)

Sekolah sudah melaksanakan kebijakan ini dengan sumber daya manusia yaitu kepala sekolah dan guru yang sudah keseluruhan mendapatkan sosialisasi GLS. Sosialisasi pun dilaksanakan bertahap, dan dengan lokasi yang berbeda-beda sehingga keseluruhan guru dengan jenjang kelas yang berbeda bisa mengikutinya. Sosialisasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) masuk ke salah satu materi Diklat Kurikulum 2013. Didukung dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Semua guru dan kepala sekolah sudah pernah mengikuti Sosialisasi GLS melalui Diklat Kurikulum 2013 yang diadakan oleh Dinas maupun LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan). (WW/GR2/SD3/3-19)

Sudah, saya mendapatkannya bersama 30 guru di kecamatan Ngantang, dan pelaksanaannya di Surabaya. (WW/GR1/SD2/2-19)

Dari segi sarana dan prasarana tersedianya gedung perpustakaan sekolah yang memiliki koleksi buku sebanyak 2500 eksemplar dan dengan rasio 40:60 untuk buku non teks dan teks. Dalam pembelajaran guru juga sudah melaksanakan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai untuk membaca buku non teks, yang akan dilanjutkan pada jam istirahat oleh siswa sesuai buku saku Gerakan Literasi Sekolah. Guru juga memajang hasil karya siswa di dinding kelas, memajang dan menggunakan media yang bisa digunakan untuk aktivitas pembelajaran. Didukung dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Untuk bangunan sekolah, kami mendapatkan Dana Sosial Bantuan Sosial dari Kemdikbud, juga mendapatkan dari SCTV, buku dari United Tractor, Buku kelas 6 sejumlah 240 eksemplar dari IDI (Ikatan Dokter

Indonesia), dan 1200 buku dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Hingga total buku sekitar 2500 eksemplar. (WW/GR1/SD3/2-19)

Walau tidak semua kelas, tapi beberapa kelas sudah membuat sudut baca. Diantaranya kelas 1, 4 dan 5. Kemudian hasil karya anak-anak dipajang di dinding sekolah. Memulai pembelajaran dengan kegiatan 15 menit membaca buku non teks pelajaran. (WW/GR2/SD3/3-19)

Namun dari segi kebijakan, belum dibuatnya SK Pembagian Tugas Tim Literasi Sekolah (TLS) sehingga dalam pelaksanaan dipasrahkan kepada guru kelas masing-masing. Untuk tenaga perpustakaan juga tidak tersedia, jadi untuk pengelolaan perpustakaan dibebankan pada guru yang mendapat tugas tambahan. Program literasi juga belum masuk kedalam RKJM dan RKJP. Pelibatan komite sekolah juga belum masuk pada ranah pengembangan minat baca dan mendukung Gerakan Literasi Sekolah. Namun kepala sekolah berkomitmen untuk melengkapi dan menyempurnakan kekurangan pada tahun ajaran mendatang. Didukung dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Belum juga, tapi rencana pada tahun ajaran mendatang akan saya perbaiki kekurangan ditahun-tahun sebelumnya. (WW/KS1/SD3/1-19)

Belum ada. Tapi kegiatan literasi sudah termuat dalam RKJM (rencana Kerja Jangka Menengah) dan RKJP (Rencana Kerja Jangka Panjang). (WW/KS1/SD2/1-19)

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat ditampilkan dalam table berikut ini:

Tabel 1. Aspek-aspek Implementasi Kebijakan

Aspek	SDN 2 Pandansari	SDN 3 Pandansari
1. Komunikasi		
- Sosialisasi/Diklat GLS	Sudah	Sudah
2. Sumber Daya		
- Tersedianya Gedung Perpustakaan	Ada	Ada
- Tersedianya Sudut Baca	Ada	Ada
- Tersedianya Pustakawan	Tidak Ada	Tidak Ada
- Tersedianya Koleksi Buku Beragam	Tidak Ada	Ada
- Guru dengan prestasi Literasi Nasional	Tidak Ada	Ada

- Dukungan Wali Murid	Aktif	Pasif
- Peserta Didik	Heterogen	Homogen
- Dukungan Komite Sekolah untuk kegiatan Literasi	Tidak Ada	Tidak Ada
- Tersedianya Papan Hasil Karya Siswa	Ada	Tidak Ada
3. Disposisi		
- Petugas Khusus Perpustakaan	Tidak Ada	Tidak Ada
- Guru dengan tugas tambahan Literasi	Ada	Ada
- Dukungan Pihak Lain/Organisasi/Warga yang Peduli Literasi	Ada	Tidak Ada
4. Struktur Birokrasi		
- SK TLS (Tim Literasi Sekolah)	Tidak Ada	Tidak Ada
- Program Literasi termuat dalam RKJM dan RKJP	Ada	Tidak Ada

Sumber Data : Diolah oleh Peneliti

2. Faktor Pendukung dan Pengambat Implementasi GLS

Kecamatan Ngantang pada tahun 2014 sempat mendapatkan musibah Erupsi Gunung Kelud yang menyebabkan 9 dari 13 Desa di Kecamatan Ngantang mengalami kerusakan yang cukup parah. Kerugian tidak hanya dari segi fasilitas umum, namun rumah, hewan ternak, bahkan tercatat di BPBD Kabupaten Malang ada 4 orang meninggal dunia. Fasilitas umum sekolah tidak luput dari kerusakan akibat tertimpa material abu dan kerikil, tercatat ada 2 sekolah yang mengalami kerusakan paling parah dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 30 hingga 40 centimeter. Adapun sekolah tersebut adalah SDN 2 Pandansari yang berada di Dusun Plumbang dan SDN 3 Pandansari yang berada di Dusun Munjung Desa Pandansari Kecamatan Ngantang dengan Radius 4 dan 5 kilometer dari Gunung Kelud. Didukung oleh hasil wawancara sebagai berikut:

Erupsi 2014 silam ya membuat aktivitas pembelajaran tidak bisa dilaksanakan, ketinggian abu vulkanik hingga 40 cm. Gedung yang rusak adalah beberapa ruang kelas, kamar mandi, ruang serba guna, dan ruang guru. Namun tidak begitu parah, sehingga tidak perlu rehab total. Tapi untuk administrasi pembelajaran, buku induk, dan buku-buku sekolah tidak bisa diselamatkan. Dan kalau untuk bantuan, kami mendapatkan alat tulis sekolah, tas sekolah, bantuan tenaga untuk membersihkan halaman sekolah dari tumpukan pasir, dan kalau untuk

bangunan DAK pada tahun 2016 untuk gedung perpustakaan. (WW/KS2/SD2/1-19)

Setelah terdampak bencana, sekolah banyak mendapatkan bantuan baik untuk bangunan sekolah maupun buku, ataupun perlengkapan sekolah anak-anak. Meliputi bantuan seragam, alat tulis, tas sekolah, buku bacaan, dan juga pembangunan kembali fisik sekolah yang rusak. (WW/GR1/SD3/2-19)

Untuk SDN 2 Pandansari mengalami kerusakan Ruang guru, halaman parkir, ruang peralatan, beberapa ruang kelas, dan kamar mandi. Sedangkan SDN 3 Pandansari hampir seluruh bangunan tidak bisa digunakan, sehingga membutuhkan tenda darurat untuk melaksanakan pembelajaran pasca erupsi.

Dengan latar belakang kejadian tersebut, membawa perubahan pada kedua sekolah dasar ini, yaitu:

- a) SDN 2 dan 3 Pandansari yang semula tidak memiliki sarana Gedung Perpustakaan, pasca erupsi memiliki gedung perpustakaan karena mendapat bantuan dana Sosial dari Kemdikbud (2014) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk SDN 2 Pandansari pada tahun 2015. Dimana sekolah sebelumnya hanya memanfaatkan ruangan yang disekat menjadi beberapa ruangan.
- b) SDN 3 Pandansari mendapatkan bantuan buku dari berbagai pihak, diantaranya dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), United Tractor, dan dari Dinas Pendidikan hingga jumlah buku mencapai 2500 buku, dengan rasio 40 : 60 buku fiksi dan buku pelajaran.
- c) Sedangkan SDN 2 Pandansari sebelum erupsi, memiliki koleksi buku non teks pelajaran, namun setelah terdampak erupsi buku tersebut mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan kembali. Dan koleksi buku setelah tahun 2014 hanya buku Tematik K-13, dan dana bos terbatas hanya 20% yang bisa digunakan untuk pembelian buku.

Dari hasil pengamatan dan wawancara dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2 Faktor Pendukung dan Faktor Pengambat Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Malang

Aspek	Faktor Pendukung	Aspek	Faktor Pengambat
Komunikasi	1. Semua Guru sudah mengikuti Sosialisasi GLS	Sumber Daya	1. Tidak memiliki tenaga perpustakaan
Komunikasi	2. Guru kelas 1 dan 6 memajang hasil karya siswa	Sumber Daya	2. Sudut baca tidak di setiap kelas
Sumber Daya	3. Tersedia Gedung Perpustakaan	Sumber Daya	3. Keterbatasan Dana BOS untuk digunakan pembelian Sarana prasarana Perpustakaan dan Sudut Baca.
Sumber Daya	4. Menjalin kerjasama dengan Mobil Kaca UMM dan Rumah Baca yang ada di sekitar sekolah	Disposisi	4. Pembelajaran masih tekstual, belum kontekstual, penggunaan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran.
Sumber Daya	5. Memiliki Guru yang berprestasi tingkat Nasional di bidang Literasi, dan menghasilkan Karya “Sepenggal Kisah di Kaki Gunung Kelud”	Sumber Daya	5. Dana BOS yang terbatas 20% untuk penambahan jumlah buku
Sumber Daya	6. Tersedia sudut baca di kelas	Sumber Daya	6. Budaya Baca Rendah
Sumber Daya	7. Tersedia fasilitas Internet		7. Dukungan orang tua rendah
Sumber Daya	8. Murid membawa buku untuk dihibahkan ke sekolah	Sumber Daya	8. Lingkungan Masyarakat yang kurang mendukung
Sumber Daya	9. Tersedia Jumlah Buku yang memadai	Sumber Daya	9. Jumlah buku yang tidak begitu banyak
Sumber Daya	10. Guru menggunakan internet untuk media pembelajaran	Sumber Daya	10. Fasilitas Baca Berada berbeda desa dengan lokasi sekolah
Sumber Daya	11. Terdapat fasilitas Perpustakaan Desa	Komunikasi	11. Tidak semua guru memajang hasil karya siswa
Sumber Daya	12. Terdapat fasilitas Rumah Baca	Struktur Birokrasi	12. Belum memiliki SK Tim Literasi Sekolah (TLS)

Sumber Daya	13. Guru yang kreatif dan inovatif		
Sumber Daya	14. Dukungan Orang Tua Peserta Didik		

Sumber Data : Diolah oleh Peneliti

E. PEMBAHASAN

1. Implementasi Gerakan Literasi Sekolah

Sekolah dasar yang berada di lereng kaki Gunung Kelud, dan berada di Kabupaten Malang bagian barat ini sesuai pengamatan peneliti telah melaksanakan implementasi Gerakan Literasi Sekolah. Dengan diawali pelaksanaan Kurikulum 2013 sebagai bentuk penyempurnaan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Sekolah Dasar Negeri 2 Pandansari terlebih dahulu melaksanakan K-13 pada tahun 2015 dan Implementasi GLS pada tahun 2015. Menyusul pada tahun berikutnya secara serentak semua sekolah baik yang sudah menerapkan K-13 ataupun belum wajib melaksanakan kegiatan Implementasi gerakan Literasi Sekolah. Diawali dengan kegiatan Sosialisasi yang ditujukan bagi Kepala Sekolah dan Dewan Guru. Sesuai pengamatan dalam upaya pelaksanaannya sekolah mengalami kendala, dan juga ditemukan faktor-faktor yang dapat menunjang optimalisasi kebijakan ini.

Dalam upaya implementasi Gerakan Literasi Sekolah di SDN 2 dan 3 Pandansari, dilihat dari hasil observasi dan wawancara dari indikator yang dibuat peneliti mengacu dari Buku Saku Gerakan Literasi Sekolah terhadap aspek warga sekolah, kepala sekolah dan guru meliputi indikator kebijakan penerapan GLS, aktivitas guru, aktivitas pembelajaran, dan siswa. Mengacu model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III masih 2 variabel yang bisa dipenuhi dalam upaya implementasinya, yaitu komunikasi dan sumber daya. Komunikasi bisa dilihat dari warga sekolah yaitu kepala sekolah dan guru yang sudah memiliki pemahaman tentang teknis pelaksanaan GLS di sekolah yang didapat melalui sosialisasi pelaksanaan GLS pada Diklat Kurikulum 2013. Guru juga sudah dapat menjadi teladan baca dan melaksanakan

pembelajaran kepada peserta didik dengan mengacu pada pedoman GLS. Dari variabel sumber daya, SDN 3 Pandansari sudah memiliki gedung perpustakaan yang memadai untuk digunakan sebagai rujukan literatur peserta didik. Meskipun masih terdapat kekurangan yaitu tidak tersedianya petugas perpustakaan, hanya dibebankan pada guru kelas yang mendapat tugas tambahan.

Sedangkan di SDN 2 Pandansari, aspek sumber daya yang dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi GLS adalah peserta didik yang beragam daerah asalnya, dimana lokasi sekolah ada di Dusun Plumbang Desa Pandansari, namun peserta didik berasal dari desa yang lokasinya jauh yang hal ini menunjukkan adanya dukungan yang besar dari orang tua wali peserta didik. Hal ini didukung dengan data wali peserta didik yang memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda, mulai dari Polisi, PNS Guru, Bidan, dan Dosen. Dimana orang tua juga ikut memantau aktivitas pembelajaran disekolah, mendukung setiap kebutuhan di sekolah. Kekurangan literatur di sekolah, disolusikan dengan penambahan jumlah buku dari hibah peserta didik untuk diletakkan disudut baca pada masing-masing kelas. Sedangkan di SDN 3 Pandansari peserta didik berasal dari dusun yang sama dengan lokasi sekolah dan mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah petani.

Hal ini berpengaruh pada dukungan yang diberikan kepada sekolah dalam implementasi GLS, hal ini serupa dengan hasil penelitian (Saputri, Fauzi, & Nurhaidah, 2017) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Anak Kelas 1 SD Negeri 20 Banda Aceh yaitu latar belakang pendidikan orang tua peserta didik, tingkat kepedulian dan pendampingan keluarga menjadi faktor-faktor yang berpengaruh dalam gerakan literasi. Hal ini menjadi peluang sekaligus dapat menjadi solusi untuk keterbatasan sekolah dengan bekerja sama dengan orang tua wali peserta didik. Gerakan Literasi Sekolah sendiri agar bisa berjalan optimal dan sesuai dengan tujuannya, yaitu warga sekolah yang literat sepanjang hayat memerlukan pembiasaan tidak hanya di sekolah. Waktu yang dimiliki anak terbagi menjadi tiga, waktu di sekolah, di rumah, dan di

lingkungan masyarakat. Peran orang tua disini adalah sebagai pemantau dan pendampingan kegiatan belajar siswa di rumah sebagai tindak lanjut kegiatannya di sekolah. Warga masyarakatpun memiliki peran dalam meunjang implementasi GLS dengan menyediakan kemudahan akses informasi dan saran abaca melalui perpustakaan desa dan rumah ataupun taman bacaan masyarakat.

Sedangkan 2 variabel berikutnya belum bisa optimal dipenuhi oleh sekolah, yaitu disposisi dan struktur birokrasi. Dimana disposisi ditunjukkan dari pemilihan guru yang tidak memiliki latar belakang pustakawan menjadi petugas dan penanggung jawab perpustakaan. Hal ini berdampak pada kurang terkelolanya kegiatan dan fasilitas perpustakaan, karena guru berfokus pada tugas utama sebagai tenaga pendidik. Kegiatan implementasi GLS pun sebatas penyediaan sudut baca di ruang kelas masing-masing. Dari segi struktur birokrasi, belum dibuatnya SK Tim Literasi sekolah, yang melibatkan semua unsur di sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, wali peserta didik, komite sekolah, peserta didik, dan masyarakat yang peduli akan pendidikan. Variabel ini mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah implementasi kebijakan, dimana kerjasama antar unsur di sekolah, sinergi yang baik antar warga sekolah dapat menekan faktor penghambat implementasi kebijakan GLS ini. Sebagai contoh tersedianya perpustakaan desa dan rumah baca yang ada di desa, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan siswa memperkaya literatur dan kegiatan menggalakkan minat baca.

2. Hambatan Pelaksanaan GLS di SDN 2 dan 3 Pandansari

Berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III, keberhasilan implementasi sebuah kebijakan ditentukan oleh 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari hasil penelitian bisa disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Hambatan Implementasi GLS Di SDN 2 & 3 Pandansari Mengacu Model Implementasi Kebijakan yang Dikembangkan oleh George C. Edward III

NO	VARIABEL	KONDISI
1	Komunikasi	- Warga sekolah (Kepala Sekolah dan Guru) sudah mengikuti sosialisasi GLS (memiliki pemahaman tentang teknis pelaksanaan dan implementasinya)
2	Sumber Daya	- Memiliki gedung perpustakaan - Memiliki koleksi buku layak - Memiliki guru dengan prestasi dibidang literasi tingkat nasional - Dukungan Wali Murid - Guru yang Kreatif dan Inovatif
3	Disposisi	- Belum memiliki tenaga perpustakaan yang kompeten di bidangnya, tugas pengelolaan dan pelaksanaan dibebankan pada guru kelas.
4	Struktur Birokrasi	- Belum memiliki SK Tim Literasi Sekolah - Program Literasi belum masuk pada RKJM dan RKJP.

Sumber Data : Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan hasil pengamatan terdapat banyak temuan yang dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi Gerakan Literasi di sekolah dasar. Hal tersebut meliputi tersedianya sarana perpustakaan sekolah dan sudut baca yang terletak di ruang kelas baik di SDN 2 maupun 3 Pandansari, hal ini dapat digunakan oleh guru sebagai rujukan informasi maupun sebagai sumber belajar. Didukung lagi di SDN 3 Pandansari koleksi buku sangat beragam, berbeda dengan di SDN 2 Pandansari, sekolah belum memiliki koleksi buku yang memenuhi guna mendukung GLS, karena tidak mendapat bantuan seperti di SDN 3. Sekolah juga belum bisa menambah koleksi buku, karena digunakan untuk membeli buku siswa kurikulum 2013, dan sempat mengalami revisi sehingga buku yang sudah dibeli tidak bisa digunakan, namun dapat digunakan sebagai bahan bacaan. Hal ini menyebabkan anggaran dana operasional sekolah yang seyogyanya bisa digunakan untuk membeli koleksi lain terkendala harus membeli buku kurikulum 2013 edisi revisi. Guru dengan wawasan, pengalaman, inovasi dan kreatifitas dibidang literasi juga dapat menjadi faktor pendukung.

Sekolah dasar yang berada dalam satu desa dan berbeda dusun ini, terdapat perbedaan dalam latar belakang wali peserta didik dan domisilinya. Di SDN 2 Pandansari, yang berada di Dusun Plumbang Desa Pandansari ini peserta didik tidak hanya berasal dari dusun setempat. Namun berasal dari desa yang berbeda hingga 6 desa, yaitu Banturejo, Ngantru, Banjarejo, Sidodadi, Pagersari, Mulyorejo. Latar belakang wali peserta didiknya pun beragam, mulai dari Petani, Pegawai Swasta, Pedagang, TNI, Guru, Dokter, Bidan, Dosen, dan Polisi. Sedangkan di SDN 3 Pandansari latar belakang wali peserta didik mayoritas petani, pedagang, dan tambang pasir. Lalu apa kaitannya, latar belakang dengan GLS. Disampaikan oleh Bapak Samidi selaku Kepala Sekolah SDN 3 Pandansari, dukungan orang tua terhadap sekolah anak minim, mereka cenderung memasrahkan segala sesuatu terhadap guru, dan kurangnya partisipatif terhadap kegiatan dan kebutuhan sekolah untuk menunjang belajar siswa. Dan di SDN 2 Pandansari, latar belakang orang tua berimbas pada dukungan dan partisipasi terhadap sekolah yang tinggi. Setiap program dan kebutuhan yang diadakan sekolah seolah gayung bersambut mendapat dukungan dari orang tua. Hal itu ditunjukkan dengan adanya iuran komite setiap bulan yang digagas dan dikelola oleh komite sekolah, serta adanya dukungan hibah buku untuk sudut baca kelas.

Tidak tersedianya tenaga perpustakaan khusus yang kompeten di bidangnya menjadi faktor penghambat di dua sekolah ini. Sehingga sekolah mendelegasikan salah satu guru kelas untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai tenaga perpustakaan. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar. Karena fokus guru akan lebih banyak pada proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Ditambah lagi sekolah belum membuat SK TLS (Surat Keputusan Tim Literasi Sekolah), dimana SK ini bertujuan untuk membagi peran guna menunjang implementasi GLS di sekolah. Guru dan warga sekolah dengan inisiatif sendiri tanpa adanya pembagian tugas, melaksanakan GLS. Sedangkan menurut standar nasional perpustakaan sekolah dasar tahun 2011 point 7.1 perpustakaan dikelola oleh tenaga perpustakaan sekurang-kurangnya 1 orang, dan kualifikasi tenaga perpustakaan sekolah minimal diploma dua dibidang ilmu perpustakaan.

Agenda sekolah untuk tahun ajaran baru disusun dan dimuat dalam RKJM (Rencana Kerja Jangka Menengah) dan RKJP (Rencana Kerja Jangka Pendek). Di SDN 3 Pandansari Kegiatan Literasi belum termuat pada keduanya, namun kepala sekolah berkomitmen untuk tahun ajaran mendatang yakni 2019-2020 akan memperbaiki dan memasukkan literasi dalam program jangka menengah dan jangka panjang. Untuk SDN 2 Pandansari, kegiatan literasi sudah masuk di dalam RKJM dan RKJP, dengan agenda kegiatan meliputi peringatan Hari Besar Nasional seperti lomba-lomba untuk memperingati Hari Kartini seperti baca dan cipta puisi serta rencana penganggaran untuk pengadaan sarana prasarana pendukung kegiatan literasi. Kegiatan berbasis literasi yang dapat menunjang program gerakan literasi sekolah, misalnya kegiatan April *books ekspo*, *talk show*, *retelling*, *fun yourbooks*, lomba-lomba, dan pemberian *reward* bagi siswa yang sering berkunjung ke perpustakaan. Hal ini serupa dengan yang disampaikan (Faradina;2017).

Keberhasilan implementasi gerakan literasi sekolah jika ditinjau dari teori Edward III terdapat 4 aspek yang harus dipenuhi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di SDN 2 & 3 Pandansari aspek komunikasi sudah terpenuhi yaitu Warga sekolah (Kepala Sekolah dan Guru) sudah mengikuti sosialisasi GLS (memiliki pemahaman tentang teknis pelaksanaan dan implementasinya). Pendukung lainnya dari aspek sumber daya adalah sudah memiliki gedung perpustakaan, koleksi buku layak dan jumlah banyak, memiliki guru dengan prestasi dibidang literasi tingkat nasional, serta mendapat dukungan dari Wali Murid, ditambah lagi memiliki Guru yang Kreatif dan Inovatif.

Aspek berikutnya yang belum terpenuhi dan dapat menjadi faktor penghambat implementasi GLS adalah aspek disposisi, yaitu belum memiliki tenaga perpustakaan yang kompeten di bidangnya, sehingga tugas pengelolaan dan pelaksanaan dibebankan pada guru kelas. Serta dari aspek struktur birokrasi belum memiliki SK Tim Literasi Sekolah, Program Literasi belum masuk pada RKJM dan RKJP. Terpenuhinya 2 dari 4 aspek tidak menjadikan kendala secara langsung dalam upaya Implementasi GLS. Gerakan Literasi Sekolah masih dapat terlaksana dengan komitmen kuat dari seluruh warga sekolah untuk membuat

gerakan ini berhasil dilaksanakan dan menghasilkan output peserta didik yang memiliki minat baca yang tinggi, kemampuan untuk mengakses informasi, dan warga sekolah yang literat sepanjang hayat.

F. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah telah dilaksanakan oleh SDN 2 dan 3 Pandansari. 1) Pelaksanaan GLS dengan penataan, penggunaan, dan pemanfaatan fasilitas gedung perpustakaan untuk menunjang implementasi. 2) Warga sekolah, Kepala Sekolah dan Guru sudah mengikuti sosialisasi GLS (memiliki pemahaman tentang teknis pelaksanaan dan implementasinya), 3) Memiliki guru dengan prestasi dibidang literasi tingkat nasional.

Dari empat aspek penunjang keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, hanya 2 aspek yang dapat dipenuhi sekolah dalam rangka implementasi GLS. Dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang membuat kebijakan ini kurang optimal, diantaranya dari aspek disposisi dan struktur birokrasi. Aspek disposisi yaitu belum memiliki tenaga perpustakaan yang kompeten di bidangnya, tugas pengelolaan dan pelaksanaan dibebankan pada guru kelas. Dan pada aspek struktur birokrasi belum memiliki SK Tim Literasi Sekolah dan Program Literasi belum masuk pada RKJM dan RKJP.

2. Saran

Kesenjangan antara konsep Gerakan Literasi Sekolah dengan Kondisi di Sekolah dapat diminimalkan dengan lebih memberikan motivasi kepada warga sekolah untuk menggunakan atau memfungsikan perpustakaan sekolah dengan berbagai kegiatan yang menarik. Sudut baca dibuat tidak hanya di ruang kelas, namun di pojok-pojok sekolah yang aman dan mudah diakses oleh peserta didik maupun orang tua peserta didik. Serta pelibatan warga sekitar, komite sekolah, orang tua peserta didik, dan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang literasi seperti rumah baca

dan Universitas Muhammadiyah Malang yang memiliki program yang dapat mendukung GLS yaitu Mobil Kaca UMM, dan juga perpustakaan desa dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan Gerakan Literasi Sekolah. Serta komitmen sekolah untuk membuat dan menentukan struktur organisasi yang termuat dalam Tim Literasi Sekolah (TLS) agar dalam upaya implementasi kebijakan disesuaikan dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensi sumber daya yang ada di sekolah.



RUJUKAN

- Abidin, Y., & Abidin, Y. (2017). Pengembangan Model Pembelajaran Literasi Berbasis Konsep Multiliterasi, Integratif, dan Berdiferensiasi (MID) di Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*.
<https://doi.org/10.21831/cp.v36i2.13283>
- Agustino, L. (2017). *Dasar dasar Kebijakan Publik* (7th ed.). Bandung: Alfabeta.
- Antasari, I. W. (2015). Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Tahap Pembiasaan di MI Muhammadiyah Gandatapa Sumbang Banyumas. *LIBRIA, Vol. 9, No. 1, Juni 2017, 9(40)*, 13–26.
- Aribowo, E. K. (2017). Menelusuri Jejak Hoaks dari Kacamata Bahasa: Bagaimana Mendeteksi Berita Palsu Sedini Mungkin. In *Literasi dalam Pembelajaran Bahasa*.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan, 10(1)*, 46–62.
- Creswell, J. W. (2008). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, *Edisi III*.
- Development, E. L. (2008). Developing Early Literacy. *Literacy*.
<https://doi.org/10.1598/RRQ.45.1.2>
- Fahmi, DB Paranoan, E. P. (2011). jurnal UPLOAD (09-03-13-02-33-32).
- Faradina, Nadya. (2017). Pengaruh Program Gerakan Literasi Sekolah Terhadap Minat Baca Siswa di SD Islam terpadu Muhammadiyah An-Najjah Jatinom Klaten. *Jurnal Hanata Widya, Volume 6, No 8, Tahun 2017*
- Fathani, Abdul Halim. (2016). *Pengembangan Literasi Matematika Sekolah Dalam Perspektif Multiple Intelligences*. EduSains.
- Ferguson, B. (2005). Information Literacy: A Primer for Teachers, Librarians, and Other Informed People, 1–14.
- Islaminingsih Wina; Rohman, Asep, R. E. (2012). Literasi Informasi dan Media bagi Siswa dalam Menunjang Pengerjaan Tugas Sekolah. *Student E-Journal*.
- Kartika, E. (2004). Memacu Minat Membaca Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Penabur*.
- Megawati, F., & Wulandari, F. (2017). Promoting Big Book and Reading Corner to Support Gerakan Literasi Sekolah (GLS) in Primary School. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*.
- Nur 'aini, E. (2017). Menumbuhkan Kebiasaan Membaca Buku Pelajaran melalui Media Ular Tangga. *BRILIANT: Jurnal Riset Dan Konseptual*.
<https://doi.org/10.28926/briliant>
- Oktaviani, I., Zuliana, E., & Ratnasari, Y. (2017). Menggagas Kajian Kearifan

Budaya Lokal di Sekolah Dasar Melalui Gerakan Literasi Sekolah. In *Aktualisasi Kurikulum 2013 dli Sekolah Dasar Melalui Gerakan Literasi Sekolah untuk Menyiapkan Generasi Unggul dan Berbudi Pekerti*.

Peraturan Kepala Perpustnas. (2017). Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 10 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Perpustakaan Universitas Indonesia. (2016). Literasi Informasi. *Perpustakaan Universitas Indonesia*.

Saputri, K., fauzi, F., & Nurhaidah, N. (2017). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Literasi Anak Kelas 1 SD Negeri 20 Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unsyiah*.

Setiawan, H., Diah Sri Lestari, N., Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jember, P., Matematika, L., & Berpikir Tingkat Tinggi, K. (2014). SOAL MATEMATIKA DALAM PISA KAITANNYA DENGAN LITERASI MATEMATIKA DAN KETERAMPILAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI. *Prosiding Seminar Nasional Matematika Universitas Jember*.

Widiasa, I. K. (2007). Manajemen Perpustakaan Sekolah. *Jurnal Perpustakaan Sekolah*.

Yani, O. :, & Astuti, K. (2016). Literasi Sains Dalam Pembelajaran Ipa. *Issh*.

Yudi C, T. (1978). Peran Perpustakaan Sekolah dalam Mencetak Siswa Berprestasi. *Perpustakaan Sekolah*.

Yuliyati. (2014). Model Budaya Baca-Tulis Berbasis Balance Literacy Dan Gerakan Informasi Literasi Di Sd. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.
<https://doi.org/10.17977/JIP.V20I1.4386>

Zaleha Ngarip. (2010). Kebolehan Membaca Kanak-kanak Prasekolah. *Psikologi Pendidikan*.

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN LITERASI
SEKOLAH (GLS) PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN
NGANTANG KABUPATEN MALANG**

LAMPIRAN CATATAN LAPANGAN

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Kebijakan Pengembangan Pendidikan**



Disusun Oleh :

**APRIDHONA TITO MINAYUGIE
NIM : 201710240211008**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Juli 2017**

DAFTAR LAMPIRAN
DOKUMEN CATATAN LAPANGAN

- Lampiran 1 : Dokumen Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumen Observasi
- Lampiran 3 : Penyajian Data
- Lampiran 4 : Dokumen Foto SDN 2 dan 3 Pandansari



CATATAN LAPANGAN

Lampiran 1 : Dokumen Wawancara

SEKOLAH : SDN 3 PANDANSARI

NARASUMBER 1 : SAMIDI, S.Pd

JABATAN : KEPALA SEKOLAH

PENDIDIKAN TERAKHIR : S1

KODE : (WW/KS1/SD3/1-19)

Keterangan

PN : Peneliti

KS : Kepala Sekolah

PN : Apakah di SDN 3 Pandansari sudah melaksanakan Kurikulum 2013 Pak?

KS : Sudah, namun baru tahun ajaran 2018-2019 ini.

PN : Mohon maaf, apakah sudah mengetahui mengenai Kebijakan gerakan Literasi Sekolah? Dan Bagaimana tanggapan Bapak?

KS : Iya, dan di sekolah kami sudah melaksanakan kebijakan tersebut semenjak dihimbau oleh dinas untuk melaksanakan baik yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 maupun yang belum. Tanggapan saya, bagus untuk diterapkan namun ya bisa dilihat sendiri kondisi di desa mungkin tidak sama dengan di kota dalam melaksanakannya.

PN : Apakah sekolah memiliki gedung perpustakaan dan mulai kapan?

KS : Sudah, gedung perpustakaan beserta buku-bukunya. Saya disini baru, dan sudah ada gedung perpustakaan.

PN : Siapa saja pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut?

KS : Untuk sementara ini masih lingkup internal sekolah, meliputi saya sendiri sebagai kepala sekolah, dan tentunya Bapak Ibu dewan Guru.

PN : Menurut Bapak apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pelaksanaan kebijakan ini Pak?

KS : Begini Bu, kalau dari internal sekolah ada beberapa hal yang dialami dalam pelaksanaan GLS ini, diantaranya belum ada lulusan khusus untuk tenaga perpustakaan, atau guru yang pernah di diklat pengelolaan perpustakaan sekolah. Terakhir saya mendapatkan pelatihan itu saat saya masih menjadi guru, bertahun-tahun yang lalu. Dan pembelajaran disini masih belum begitu menggunakan perpustakaan untuk sarana pembelajaran. Budaya baca anak-anak masih rendah, sehingga perpustakaan sepi. Ditambah lagi mayoritas penduduk disini petani, yang semenjak erupsi gunung kelud banyak yang beralih profesi menjadi pencari pasir yang mana dukungan terhadap pendidikan kurang akrena alasan tuntutan ekonomi. Kalau di kota mungkin enak ya, orang tuanya sudah modern, mengikuti perkembangan anaknya di sekolah. Kalau di desa pokoknya anak sekolah, pulang sekolah membantu orang tua.

PN : Bagaimana pendanaan yang digunakan untuk menunjang implementasi kebijakan ini Pak?

KS : Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) terbatas untuk pengadaan buku. Banyak pos pos biaya yang harus ditanggung sekolah, seperti bahan habis pakai, ujian siswa kelas 1 sampai 5, dan serangkaian ujian kelas 6 yang membutuhkan biaya tidak sedikit.

PN : Apakah sudah ada SK (Surat Keputusan) yang mengatur tentang Tim Literasi Sekolah (TLS)?

KS : Belum ada.

PN : Tapi apakah kegiatan literasi sudah termuat dalam RKJM (rencana Kerja Jangka Menengah) dan RKJP (Rencana Kerja Jangka Panjang) sekolah?

KS : Belum juga, tapi rencana pada tahun ajaran mendatang akan saya perbaiki kekurangan ditahun-tahun sebelumnya.

PN : Kegiatan Literasi apa yang pernah dilakukan sekolah bekerja sama dengan pihak luar sekolah?

KS : Sekolah kami pernah didatangi oleh Mobil Kaca UMM.

PN : Apa bentuk kerjasama yang ditawarkan sekolah?

KS : Bukan, waktu itu salah satu kegiatan dari KKN UMM yang ada di Desa Pandansari.

NARASUMBER 2 : SRI DEWI MULYANINGATI, S.Pd
JABATAN : GURU KELAS
PENDIDIKAN TERAKHIR : S1, dan sedang menempuh S2 Dikdas
KODE : (WW/GR1/SD3/2-19)

Keterangan

PN : Peneliti

GR : Guru

PN : Bu Dewi sudah lama mengajar di SDN 3 Pandansari?

GR : Iya, saya mulai GTT sampai PNS disini, sudah hampir 15 tahun. Dimulai dari 2004-2014 menjadi GTT (Guru Tidak tetap), lalu 2014-2016 status CPNS (Calon pegawai negeri Sipil), dan PNS (Pegawai negeri Sipil) mulai 2016 hingga sekarang 2019.

PN : Berarti bagaimana awal sekolah ini hingga terjadi banyak perubahan, ibu mengetahui dengan jelas ya Bu?

GR : Iya, pada tahun 2014 gedung sekolah rusak terkena Erupsi Gunung Kelud. Dan berdampak pada aktivitas pembelajaran, Karena hampir keseluruhan ruangan rusak.

PN : Untuk Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah, apa juga sudah tahu Bu?

GR : Sudah, di sekolah ini sudah melaksanakannya.

PN : Bagaimana tanggapan Bu Dewi terhadap Kebijakan ini?

GR : Ya bagus ya kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan, dan untuk fisik atau bangunan sekolah juga sudah bagus hanya saja untuk manajerialnya yang masih belum. Pertama, tenaga yang berkompeten di bidangnya tidak ada, mayoritas masyarakatnya bisa dikatakan tidak mampu, untuk masalah pendidikan anaknya dipasrahkan ke sekolah, harapan untuk pendidikan anaknya rendah, pemahaman kegunaan buku untuk apa juga masih kurang.

PN : Kalau dari sekolah sendiri Bu? Apakah Erupsi Gunung Kelud berdampak pada sarana dan prasarana? Mengingat kata ibu tadi, hampir keseluruhan rusak akibat erupsi.

GR : Setelah terdampak bencana, sekolah banyak mendapatkan bantuan baik untuk bangunan sekolah maupun buku, ataupun perlengkapan sekolah anak-anak. Meliputi bantuan seragam, alat tulis, tas sekolah, buku bacaan, dan juga pembangunan kembali fisik sekolah yang rusak.

PN : Kalau boleh saya tahu, dari mana saja asal bantuan tersebut Bu?

GR : Untuk bangunan sekolah, kami mendapatkan Dana Sosial Bantuan Sosial dari Kemdikbud, juga mendapatkan dari SCTV, buku dari United Tractor, Buku kelas 6 sejumlah 240 eksemplar dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia), dan 1200 buku dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Hingga total buku sekitar 2500 eksemplar.

PN : Apa kendala yang dihadapi dalam upaya implementasi kebijakan ini Bu?

GR : Ya seperti saya jelaskan tadi, kalau dari fisik sekolah sudah bagus, hanya saja dari pengelolaannya yang belum maksimal. Sebagai contoh saja di kelas 5, masih ada anak yang belum bisa membaca. Ketika kita akan mengajak pada kegiatan literasi, kita harus berfokus untuk anak yang belum bisa membaca tersebut.

PN : Selain gedung perpustakaan, apakah terdapat sudut baca di kelas Bu?

GR : Sudut baca sudah ada, tapi tidak di semua kelas.

PN : Apakah guru disini aktif menggunakan literatur baik cetak maupun elektronik?

GR : Disini tersedia akses internet yang biasa digunakan guru untuk literasi digital, seperti membuka website Rumah Belajar Kemdikbud. Saya juga mengikuti diklat Sagu Sabu (Satu Guru Satu Buku), dan sudah membuat karya berupa buku berjudul “Sepenggal Kisah di kaki Gunung Kelud”. Saya juga sering memotivasi anak-anak dengan membawa berbagai buku ke dalam kelas.

NARASUMBER 3 : LILIK NURIANA, S.Pd
JABATAN : GURU KELAS
PENDIDIKAN TERAKHIR : S1
KODE : (WW/GR2/SD3/3-19)

Keterangan

PN : Peneliti

GR : Guru

PN : Apa Bu Lilik mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS)?

GR : Iya, saya sudah tahu dan di sekolah sudah menerapkan.

PN : Apakah Bu Lilik sudah pernah mengikuti semacam workshop atau pelatihan GLS?

GR : Semua guru dan kepala sekolah sudah pernah mengikuti Sosialisasi GLS melalui Diklat Kurikulum 2013 yang diadakan oleh Dinas maupun LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan).

PN : Siapa saja pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini Bu?

GR : Ya hanya kepala sekolah dan dewan guru dari masing-masing pengampu kelas.

PN : Apakah sarana perpustakaan digunakan untuk menunjang GLS?

GR : Perpustakaan digunakan kadang-kadang saja, karena yang khusus mengelola perpustakaan tidak ada. Hanya guru, yaitu saya yang diberikan tugas tambahan untuk mengelola. Tapi waktu saya lebih banyak ke kelas 1 karena tahu sendiri, kelas kecil tidak bisa ditinggal-tinggal.

PN : Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan untuk melaksanakan kebijakan ini Bu?

GR : Walau tidak semua kelas, tapi beberapa kelas sudah membuat sudut baca. Diantaranya kelas 1, 4 dan 5. Kemudian hasil karya anak-anak dipajang di dinding sekolah. Memulai pembelajaran dengan kegiatan 15 menit membaca buku non teks pelajaran.

SEKOLAH : SDN 2 PANDANSARI
NARASUMBER 1 : Dra. SRI WAHYUNI
JABATAN : KEPALA SEKOLAH
PENDIDIKAN TERAKHIR : S1
KODE : (WW/KS2/SD2/1-19)

Keterangan :

PN : Peneliti

KS : Kepala Sekolah

PN : Apakah di SDN 2 Pandansari sudah melaksanakan Kurikulum 2013 Bu?

KS : Sudah, SDN 2 Pandansari termasuk salah satu sekolah yang pertama kali melaksanakan K-13 pada tahun 2014. Di Ngantang kan untuk pelaksanaan K-13 ini bertahap, dimulai dari tahun pertama kelas 1 dan kelas 4, sebagai perwakilan kelas bawah dan kelas atas. Kemudian dilanjutkan pada tahun berikutnya yang seharusnya kelas 2 dan kelas 5, namun sempat terhenti pada semester 2 beralih ke KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Kemudian berlanjut hingga tahun ajaran 2018-2019 sekolah kami sudah secara keseluruhan melaksanakan Kurikulum 2013.

PN : Dan untuk Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) apa juga sudah dilaksanakan Bu? Dan Bagaimana tanggapan ibu?

KS : Sudah, semenjak melaksanakan Kurikulum 2013 dan himbuan dari dinas untuk melaksanakan, sekolah kami sudah melaksanakan kebijakan tersebut. Ya, siap tidak siap ya harus dilaksanakan, karena juga memiliki tujuan yang baik untuk siswa.

PN : Apakah sekolah sudah memiliki gedung perpustakaan? Dan mulai kapan Bu?

KS : Sudah, pasca erupsi Gunung Kelud tahun 2014, sekolah kami mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2016. Sebelumnya perpustakaan ada di sebelah ruang kepala sekolah, yaitu ruang serbaguna yang kami sekat menjadi beberapa kegunaan. Diantaranya ruang perpustakaan, ruang uks, ruang komite dan ruang komputer. Jadi kami belum memiliki ruangan tersendiri, dan dari jenis buku juga masih koleksi lama, yang sebenarnya sudah tidak layak pakai.

PN : Apa dampak bencana pada sekolah dan bantuan apa saja yang diterima oleh sekolah?

KS : Erupsi 2014 silam ya membuat aktivitas pembelajaran tidak bisa dilaksanakan, ketinggian abu vulkanik hingga 40 cm. Gedung yang rusak adalah beberapa ruang

kelas, kamar mandi, ruang serba guna, dan ruang guru. Namun tidak begitu parah, sehingga tidak perlu rehab total. Tapi untuk administrasi pembelajaran, buku induk, dan buku-buku sekolah tidak bisa diselamatkan. Dan kalau untuk bantuan, kami mendapatkan alat tulis sekolah, tas sekolah, bantuan tenaga untuk membersihkan halaman sekolah dari tumpukan pasir, dan kalau untuk bangunan DAK pada tahun 2016 untuk gedung perpustakaan.

PN : Apakah ada petugas khusus untuk perpustakaan?

KS : Kalau untuk lulusan yang kompeten, tidak ada. Hanya bersifat sebagai penanggung jawab peminjaman buku dan itu dari guru kelas yang diberikan tugas tambahan.

PN : Siapa saja pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut?

KS : Tentu saja saya selaku kepala sekolah, bapak dan ibu dewan guru, dan siswa-siswi.

PN : Apakah tidak ada dukungan dari Komite sekolah?

KS : Komite sekolah banyak berkontribusi untuk sekolah, namun tidak terfokus pada dukungan Gerakan Literasi Sekolah (GLS), tapi untuk hal-hal lain diluar kapasitas sekolah, seperti rencana pengadaan gedung UKS, kegiatan ekstrakurikuler Drumband, dan keamanan pangan di sekolah.

PN : Apakah sudah ada SK (Surat Keputusan) yang mengatur tentang Tim Literasi Sekolah (TLS)?

KS : Belum ada. Tapi kegiatan literasi sudah termuat dalam RKJM (rencana Kerja Jangka Menengah) dan RKJP (Rencana Kerja Jangka Panjang)

PN : Bagaimana pendanaan yang digunakan untuk menunjang implementasi kebijakan ini Bu?

KS : Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang boleh digunakan untuk pengadaan buku sebesar 20%. Dan karena sekolah sudah melaksanakan K-13 mulai tahun 2014, dana BOS digunakan untuk membeli buku guru dan buku siswa K-13, yang pada tahun 2016 terdapat revisi, sehingga sekolah kembali harus membeli buku baru dan yang lama tidak dipakai lagi. Hal ini juga yang menjadi ketakutan sekolah apabila kembali terdapat revisi, karena dana akan kembali habis digunakan untuk membeli buku teks pelajaran karena jumlah murid di SDN 2 Pandansari sebanyak 234 siswa.

PN : Apa saja yang disiapkan sekolah untuk mengoptimalkan implementasi Kebijakan GLS?

KS : Tentu saja mengacu pada buku pedoman, yaitu adanya perpustakaan sekolah dan sudut baca di setiap kelas. Itu yang selalu saya himbau pada bapak ibu guru untuk melaksanakannya. Kemudian merencanakan kegiatan literasi dalam peringatan hari besar, seperti lomba baca puisi pada peringatan Hari Kartini.

PN : Bagaimana dukungan Walimurid untuk kegiatan sekolah, khususnya GLS?

KS : Di SDN 2 Pandansari ini berbeda dengan sekolah lain, lokasi sekolah berada di Dusun Plumbang Desa Pandansari, tapi Muridnya berasal dari desa tetangga. Mulai dari Desa Pagersari, Sidodadi, Ngantru, Banturejo, Pandansari sendiri, Mulyorejo, tahun lalu ada yang dari Banjarejo dan Purworejo bahkan ada yang dari beda kecamatan, yaitu dari Kecamatan Pujon tapi juga karena alasan orang tua bekerja di Ngantang. Namun dari sini bisa dilihat, ketika orang tua menyekolahkan putra-putrinya jauh dari rumah berarti dari segi financial cukup, atau sudah menganggarkan untuk biaya pendidikan anaknya. Bisa dibaca juga dukungan orang tua terhadap kemajuan pendidikan putra-putrinya besar. Pekerjaan orang tua juga beragam, mulai dari Petani, Polisi, Bidan, Guru, Kepala Desa, dan juga Dosen.

PN : Apakah sekolah bekerjasama dengan pihak luar sekolah dalam menunjang implementasi GLS?

KS : Iya, pernah didatangi oleh Mobil Kaca (Kamis Membaca) dari kampus UMM (Universitas Muhammadiyah Malang), dan berencana untuk mengajukan kerjasama untuk rutinan setiap bulan atau tiga bulan sekali melakukan kunjungan ke sekolah. Dan siswa siswi kami juga aktif mengunjungi perpustakaan yang berada berbeda desa, yaitu Rumah Baca.

NARASUMBER 2 : YASON BASKORO
JABATAN : GURU, yang juga mendapat tugas tambahan sebagai
Operator Sekolah.
PENDIDIKAN TERAKHIR : S1
KODE : (WW/GR1/SD2/2-19)

Keterangan :

PN : Peneliti

GR : Guru

PN : Apa Pak Yason mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS)?

GR : Iya, di sekolah sudah menerapkan itu.

PN : Apakah Bapak sudah pernah mengikuti semacam workshop atau pelatihan GLS?

GR : Sudah, saya mendapatkannya bersama 30 guru di kecamatan Ngantang, dan pelaksanaanya di Surabaya.

PN : Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan untuk melaksanakan kebijakan ini Pak?

GR : Adanya akses internet yang bisa digunakan hanya untuk guru, karena kalau ke anak-anak kami terbatas pemantauannya. Kemudian adanya sudut baca di setiap kelas, walau jumlah bukunya terbatas dan akhirnya sekolah membunyai kegiatan untuk untuk secara sukarela menghibahkan buku untuk dipajang di sudut baca sekolah. Lha buku yang dimiliki sekolah hanya buku teks pelajaran K-13, untuk fiksi belum memiliki pasca rusak terdampak bencana. Kemudian poster-poster yang bisa dibaca anak-anak, dan sebenarnya itu jauh sebelum GLS dilaksanakan. Yang baru ini adalah poster Pahlawan.

PN : Menurut bapak apakah sekolah bisa dikatakan siap untuk melaksanakan Kebijakan GLS ini?

GR : Karena masih awal, wajar kalau masih ada kekurangan disana-sini, tapi seiring berjalannya waktu pasti ada upaya untuk pembenahan dan menyesuaikan pedoman.

NARASUMBER 3 : TITIK DESI NURDIANA, S.Pd
JABATAN : GURU
PENDIDIKAN TERAKHIR : S1
KODE : (WW/GR2/SD2/3-19)

Keterangan :

PN : Peneliti

GR : Guru

PN : Apakah di kelas yang diampu sudah menerapkan kegiatan Gerakan Literasi Sekolah?

GR : Iya, dikelas saya sudah melaksanakan kegiatan literasi seperti menyediakan sudut baca di kelas dengan koleksi buku berasal dari siswa-siswi yang menghibahkan buku ke sekolah untuk bergantian dibaca oleh teman-teman sekelasnya. Saya juga sering memberikan pelajaran di perpustakaan dengan menggunakan laptop dan proyektor sekolah serta akses internet untuk pembelajaran anak.

PN : Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam rangka implementasi GLS?

GR : Membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, dan dilanjutkan saat jam istirahat atau dirumah. Membaca cerita dari buku yang beragam yang sudah dibaca dirumah, untuk kemudian dituliskan judul, tokoh, dan amanat lalu ditempelkan dalam pohon literasi.

PN : Apakah sudah pernah mengikuti kegiatan Sosialisasi GLS?

GR : Sudah, saat diklat Guru Sasaran Implementasi Kurikulum 2013, dan didalamnya memuat GLS.

PN : Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan GLS di sekolah?

GR : Kendalanya adlah ketika buku-buku yang tersedia itu merupakan buku-buku cerita lama dan dianggap membosankan. Karena anak-anak jaman sekarang lebih menyukai cerita berbau mistis di era modern dibandingkan cerita nusantara. Akhirnya saya solusikan dengan memasukkan berbagai cerita Nusantara ke pembelajaran tematik, tujuannya adalah agar siswa merasa bahwa itu penting sehingga menimbulkan rasa ingin tahu.

**HASIL OBSERVASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GLS JENJANG SEKOLAH
DASAR DI KABUPATEN MALANG**

Sekolah : SDN 2 & 3 Pandansari Kec. Ngantang Kab. Malang

Pengamatan	Variabel	Indikator	SDN 2	SDN 3
Sekolah	Lingkungan Sekolah	1. Tersedianya Perpustakaan Sekolah	√	√
		2. Adanya Petugas Khusus Perpustakaan	X	X
		3. Terdapat sudut baca di ruang kelas	√	√
		4. Terdapat pojok literasi di sekolah	X	X
		5. Terpajang hiasan poster baca, kampanye membaca untuk memperluas pemahaman dan tekak warga sekolah untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat	√	√
		6. Tersedianya media untuk memajang karya peserta didik	√	√
		7. Tersedianya jaringan internet		
Informan	Kepala Sekolah	1. Adanya SK Pembagian Tugas Tim Literasi Sekolah (TLS)	X	X
		2. Program Literasi masuk ke RKJM dan RKJP	√	X
		3. Pelibatan Komite Sekolah dalam kegiatan GLS	X	X
		4. Membentuk TLS yang beranggotakan Komite Sekolah	X	X
	Guru	Guru Menjadi Teladan Membaca		
		1. Guru turut membaca saat siswa membaca	√	√
		2. Guru aktif menggunakan literatur baik cetak maupun elektronik	√	√
		3. Guru membaca buku	√	√

		4. Guru membuat karya yang dimuat dalam media cetak maupun elektronik	X	√
		5. Guru mengikuti Pelatihan GLS	√	√
		Pembelajaran	√	√
		1. Guru melaksanakan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, buku non teks pelajaran	√	√
		2. Kegiatan Literasi masuk dalam rencana pembelajaran	√	√
		3. Guru memajang hasil karya siswa	√	√
		4. Guru melaksanakan kegiatan membaca nyaring	√	√
		5. Guru melaksanakan kegiatan membaca mandiri	√	√
		6. Guru melaksanakan kegiatan membaca bersama	√	√
		7. Guru melaksanakan kegiatan membaca terpandu	√	√
		8. Ada bahan kaya teks terkait dengan mata pelajaran yang terpampang di tiap kelas	√	X
		Peserta Didik		
		1. Siswa membawa buku non teks pelajaran dari rumah	√	√
		2. Siswa pernah membaca buku non teks pelajaran	√	√
		3. Peserta didik memiliki portofolio yang berisi kumpulan jurnal respon membaca	√	X
		4. Ada penghargaan terhadap pencapaian peserta didik dalam kegiatan berliterasi		

**DOKUMEN OBSERVASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GLS JENJANG
SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MALANG**

LOKASI : SDN 2 PANDANSARI KEC. NGANTANG KAB. MALANG

KEGIATAN : AKTIVITAS PEMBELAJARAN

OBJEK : TITIK DESI NURDIANA (GURU)

JAM/TANGGAL : 07.00-10.00 WIB / 18 Agustus 2018

Pengamatan dimulai pada pukul 07.00, dan kondisi sekolah masih belum masuk. Adapun jam masuk sekolah adalah 07.15 dan diawali dengan kegiatan senam dan tepuk PPK (Penguatan Pendidikan karakter), dan bersalaman dengan guru sebelum berbaris memasuki ruang kelas masing-masing. Saat didalam kelas nampak siswa yang merapikan tumpukan buku yang berada di sudut depan kelas. Kegiatan pembelajaran dimulai oleh guru dengan meminta anak-anak berdoa sebelum memulai pembelajaran, pengkodisian kelas, dan kegiatan literasi yang diamati adalah guru menanyakan buku apa yang dibaca semalam dan meminta anak-anak menuliskannya pada sebuah kertas yang sudah disiapkan guru dan menempelkannya pada pohon literasi yang ditempel di tembok belakang kelas.

Saat jam istirahat tiba, pukul 09.15 wib beberapa anak beristirahat diluar kelas, dan ada beberapa anak yang membawa bekal tetap berada diruang kelas dan dilanjutkan dengan kegiatan membaca buku yang berada disudut baca kelas. Buku berasal dari siswa yang diberikan kepada sekolah khususnya untuk ditaruh di sudut baca kelas dan dapat dibaca bergantian oleh teman-teman dikelasnya. Salah satu contoh bukunya adalah Sang Dwi Warna dan Kumpulan Dongeng Nusantara.

**DOKUMEN OBSERVASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GLS JENJANG
SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MALANG**

LOKASI : SDN 3 PANDANSARI KEC. NGANTANG KAB. MALANG

KEGIATAN : AKTIVITAS PEMBELAJARAN

OBJEK : LILIK NURIANAH (GURU)

JAM/TANGGAL : 06.45-09.00 WIB / 7 April 2019

Pengamatan dimulai pada pukul 06.45, kegiatan hari ini disekolah dimulai dengan kegiatan senam, pengarahan oleh bapak guru, dan tepuk PPK (Penguatan Pendidikan karakter), kemudian bersalaman dengan guru dan berbaris memasuki ruang kelas masing-masing. Kegiatan pembelajaran dimulai oleh guru yang meminta anak-anak berdoa sebelum memulai pembelajaran, nampak seorang anak laki-laki yang maju dan memimpin doa. Kemudian pengkodisian kelas dengan menanyakan siswa yang hadir dan yang tidak hadir, dan kegiatan literasi yang diamati adalah guru meminta anak-anak membaca buku teks pelajaran yang ada di buku siswa pada halaman belakang yang berisi bacaan diluar teks pelajaran. Hasil karya siswa dipajang pada sisi samping dan belakang kelas, dan dipajang bergantian sesuai tugas yang diberikan guru. Nampak yang dipajang adalah portofolio siswa yang dikumpulkan dalam sebuah map yang khusus diperuntukkan untuk masing-masing anak.

Lampiran 3. Penyajian Data

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH
(GLS) PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MALANG**

Aspek	SDN 2 Pandansari	SDN 3 Pandansari
1. Komunikasi		
- Sosialisasi/Diklat GLS	Sudah	Sudah
2. Sumber Daya		
- Tersedianya Gedung Perpustakaan	Ada	Ada
- Tersedianya Sudut Baca	Ada	Ada
- Tersedianya Pustakawan	Tidak Ada	Tidak Ada
- Tersedianya Koleksi Buku Beragam	Tidak Ada	Ada
- Guru dengan prestasi Literasi Nasional	Tidak Ada	Ada
- Dukungan Wali Murid	Aktif	Pasif
- Peserta Didik	Heterogen	Homogen
- Dukungan Komite Sekolah untuk kegiatan Literasi	Tidak Ada	Tidak Ada
- Tersedianya Papan Hasil Karya Siswa	Ada	Tidak Ada
3. Disposisi		
- Petugas Khusus Perpustakaan	Tidak Ada	Tidak Ada
- Guru dengan tugas tambahan Literasi	Ada	Ada
- Dukungan Pihak Lain/Organisasi/Warga yang Peduli Literasi	Ada	Tidak Ada
4. Struktur Birokrasi		
- SK TLS (Tim Literasi Sekolah)	Tidak Ada	Tidak Ada
- Program Literasi termuat dalam RKJM dan RKJP	Ada	Tidak Ada

Faktor Pendukung dan Faktor Pengambat Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Malang.

Aspek	Faktor Pendukung	Aspek	Faktor Pengambat
Komunikasi	2. Semua Guru sudah mengikuti Sosialisasi GLS	Sumber Daya	3. Tidak memiliki tenaga perpustakaan
Komunikasi	4. Guru kelas 1 dan 6 memajang hasil karya siswa	Sumber Daya	4. Sudut baca tidak di setiap kelas
Sumber Daya	5. Tersedia Gedung Perpustakaan	Sumber Daya	5. Keterbatasan Dana BOS untuk digunakan pembelian Sarana prasarana Perpustakaan dan Sudut Baca.
Sumber Daya	6. Menjalin kerjasama dengan Mobil Kaca UMM dan Rumah Baca yang ada di sekitar sekolah	Disposisi	6. Pembelajaran masih tektstual, belum kontekstual, penggunaan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran.
Sumber Daya	7. Memiliki Guru yang berprestasi tingkat Nasional di bidang Literasi, dan menghasilkan Karya “Sepenggal Kisah di Kaki Gunung Kelud”	Sumber Daya	7. Dana BOS yang terbatas 20% untuk penambahan jumlah buku
Sumber Daya	8. Tersedia sudut baca di kelas	Sumber Daya	7. Budaya Baca Rendah
Sumber Daya	8. Tersedia fasilitas Internet		15. Dukungan orang tua rendah
Sumber Daya	16. urid membawa buku untuk dihibahkan ke sekolah	Sumber Daya	13. Lingkungan Masyarakat yang kurang mendukung
Sumber Daya	17. ersedia Jumlah Buku yang memadai	Sumber Daya	14. Jumlah buku yang tidak begitu banyak
Sumber Daya	18. Guru menggunakan internet untuk media pembelajaran	Sumber Daya	15. Fasilitas Baca Berada berbeda desa dengan lokasi sekolah
Sumber Daya	19. Terdapat fasilitas Perpustakaan Desa	Komunik asi	16. Tidak semua guru memajang hasil

			karya siswa
Sumber Daya	20. Terdapat fasilitas Rumah Baca	Struktur Birokrasi	17. Belum memiliki SK Tim Literasi Sekolah (TLS)
Sumber Daya	21. Guru yang kreatif dan inovatif		
Sumber Daya	22. Dukungan Orang Tua Peserta Didik		



SDN 2 Pandansari

1. Kunjungan Mobil Kaca UMM ke SDN 2 Pandansari Kec. Ngantang Kab. Malang



2. Kunjungan ke Rumah Baca "Rumba Rimba" saat maupun di luar jam pelajaran.



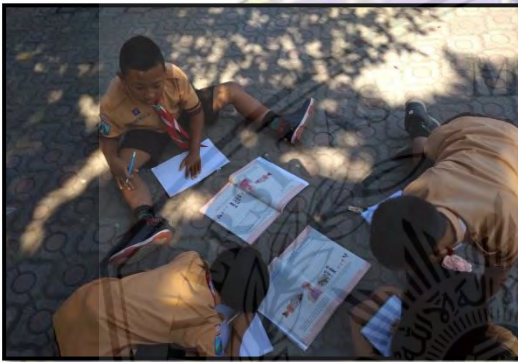
3. Aktivitas Pembelajaran di Kelas Bu Titik Desi Nurdiana-SDN 2 Pandansari



3.1 Kegiatan membaca saat jam istirahat



3.2 Pohon Literasi Peserta Didik



3.1 Kegiatan pembelajaran di luar kelas



3.2 Sudut Baca Kelas

4. Koridor SDN 2 Pandansari dengan pajangan poster Pahlawan dan Slogan



5. Ruang Kelas SDN 2 Pandansari dengan media dan pajangan hasil karya siswa



6. Perpustakaan SDN 2 Pandansari



SDN 3 Pandansari

1. SDN 3 Pandansari Sebelum dan Sesudah Mendapat Bantuan Pasca Erupsi



1.1 Kondisi Sekolah setelah terdampak Erupsi Gunung Kelud.

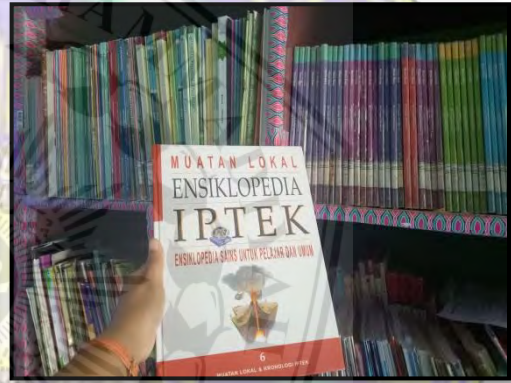


1.2 Kondisi Sekolah setelah mendapat Bantuan Sosial

2. Ruang Kelas SDN 3 Pandansari



3. Ruang Perpustakaan dan Sudut Baca SDN 3 Pandansari



4. Koridor dan Halaman Sekolah SDN 3 Pandansari serta dokumentasi Wawancara

